



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI AFAS**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : III
- Rapat Ke- : ---
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021
- Waktu : 17.40 s.d. 18.03 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I Lt.1,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR
RI
- Acara : Penjelasan Pemerintah terhadap Rencana Pengesahan
Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket 10
dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang
Jasa (*Protocol to Implement the Package of
Commitments under the ASEAN Framework
Agreement on Services*)
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI
DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
46 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Surya Sulisto
 3. Muhammad Prakosa
 4. Darmadi Duriyanto
 5. Rieke Diah Pitaloka

6. ST. Ananta Wahana, S.H.
 7. Sonny T. Danaparamita
 8. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Matriks)
 10. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 11. dr. H. Mufti A. N. Anam.
-
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
 3. Drs. Mukhtarudin
 4. Lamhot Sinaga
 5. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M
 6. Doni Akbar, S.E.
 7. Nusron Wahid
-
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
5 dari 7 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Andre Rosiade
 3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
 4. Khilmi
 5. Hendrik Lewerissa, S.H.,LL.M
-
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E.,M.A.
 2. Nyat Kadir (Matriks)
 3. H. Subardi, S.H., M.H
 4. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M
 5. Muhammad Rapsel Ali
-
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. Faisol Riza, S.S.
 2. Ir. H. M. Nasim Khan
 3. Tommy Kurniawan
 4. Marwan Ja'far
 5. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos.,
M.Si
 6. Siti Mukaromah, S.Ag.,M.A.P
-
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M,Si.
 2. Muhammad Dhevy Bijak
 3. Hj. Melani Leimena Suharli

4. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Nevi Zuairina
 2. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih
 2. Primus Yustisio, S.E.
 3. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
 4. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
 2. Elly Rachmat Yasin

B. LEMBAGA NEGARA.

C. PEMERINTAH.

D. UNDANGAN YANG LAIN.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Pak Menteri, kita ini ada agenda satu lagi. Mungkin karena, saya juga belum salat asar, ya tergantung. Ini apakah mau dilanjut atau diri *reschedule*, ada. Nggak boleh lagi ya? Oh, sudah sudah, Pak.

ANGGOTA:

Pak Pimpinan, kalau saya boleh usul, ini kan sebenarnya prosedur. Apa boleh kita dengan tata krama 5 menit aja sebelum jam 6 gitu supaya selesai. Karena, saya bisa sampaikan secara tertulis. Karena, ini kan minta maaf Pak Pimpinan. Tapi ini kan sudah sudah biasa dan ini hanya bagian dari pada suatu kebiasaan. Dengan persetujuan Pimpinan kita anggap saja kita sudah selesai dalam konsep ini atau kita mesti balik lagi?

KETUA RAPAT:

Itu yang sebetulnya kita mau tanyakan tadi atau matiin dulu ya.

(suara tidak terdengar)

Baik, mohon yang nggak berkepentingan.
Oke, ini kita buka sesi berikutnya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Syalom.

Om swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan; dan

Anggota Komisi VI DPR RI; dan

Selamat datang kembali kita ucapkan kepada Yang terhormat Menteri Perdagangan, Bapak Lutfi, Muhammad Lutfi; beserta Bapak Wakil Menteri, Bapak Jerry Sambuaga; beserta para jajarannya.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga, kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan pada hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan terhindar dari wabah Covid.

Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif terkait penyebaran Covid, maka rapat-rapat oleh alat kelengkapan dewan dengan mitra kerja dilakukan dengan ketentuan, yaitu:

1. Pasal 226 Ayat (3), Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR, kecuali ditentukan lain. Rapat dapat dilakukan di luar Gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR maka pelaksanaan rapat dilakukan secara tatap muka dan/ secara virtual;
2. Peliputan rapat Komisi VI dilakukan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak lainnya dapat mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen;
3. Berdasarkan Pasal 249 Ayat (1), Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi, setiap Anggota menandatangani daftar hadir, menghadiri rapat terlebih dahulu dan bagi mereka yang hadir secara elektronik dapat melakukan absen secara elektronik dalam list partisipasi Zoom;
4. Mengenai ketentuan rapat, saya rasa ini nggak perlu saya ulang ya. Sebagian ini sama seperti yang tadi. Kita langsung ke materi inti aja.

Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, Rapat Kerja pada hari ini telah ditanda tangani oleh tadi 24 Anggota dari 9 Fraksi sehingga, kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib maka, perkenankan kami membuka Rapat Kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Setuju.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 17.40 WIB)

Terima kasih, kami ucapkan kepada Saudara Menteri Perdagangan atas kesediaan waktunya untuk menghadiri Raker pada hari ini dan sesuai undangan yang kami sampaikan. Agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah penjelasan Pemerintah melalui Menteri Perdagangan terhadap rencana pengesahan protokol untuk melakukan paket 10 dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa (*Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*).

Untuk itu kami minta persetujuan kepada teman-teman Komisi VI agar rapat kita tutup pada pukul 6. Setuju ya. Luar biasa.

(RAPAT:SETUJU)

Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan.

Dapat kami sampaikan bahwa:

1. Presiden Republik Indonesia menyampaikan surat Nomor RI14, maaf R14 Pres 04 2019, tanggal 9 April pada Ketua DPR, seperti hal rencana pengesahan *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*;
2. Selanjutnya, dalam konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 16 Juni 2020 melalui surat PW 0691 DPRRI 6 2020, tanggal 14 Mei 2020 perihal Penugasan untuk membahas Ratifikasi AFAS Paket 10, menyetujui pembahasan terhadap Ratifikasi AFAS Paket 10 diserahkan pada Komisi VI DPR RI dan apabila pembahasan telah selesai, maka diharapkan untuk segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi VI DPR RI telah ditugaskan untuk pembahasan terhadap ratifikasi AFAS 10, meminta penjelasan Pemerintah terhadap rencana pengesahan protokol untuk melaksanakan komitmen paket 10 dalam persetujuan rangka kerja ASEAN di bidang jasa.

Untuk itu, Komisi VI ingin mendengarkan penjelasan Pemerintah terhadap persetujuan pembahasan perjanjian perdagangan internasional dimaksud. Kepada Saudara Menteri, kami persilakan.

MENTERI PERDAGANGAN:

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak Ketua Komisi VI yang terhormat,

Ibu Bapak Anggota Komisi VI yang terhormat,

Bapak Ibu peserta rapat yang terhormat.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore, dan

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena, berkat rahmat dan karunia-Nya maka kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini untuk membahas rencana pengesahan *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Protokol untuk melaksanakan komitmen paket 10 dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa atau dapat disebut juga sebagai AFAS Paket 10.

Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota Komisi VI DPR RI yang telah mengundang kami untuk dapat menjelaskan mengenai pengesahan AFAS Paket 10. Hal ini merupakan bukti dan atas komitmen bersama legislatif dan eksekutif untuk bahu membahu memajukan kepentingan Indonesia dalam konteks perdagangan internasional untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sebesar-besarnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, mandat dari Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan bahwa perjanjian perdagangan internasional perlu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian perdagangan internasional tersebut yang dilakukan paling lama 60 hari dari kerja, hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal PPI menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang;
- b. Dalam hal PPI tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden dengan, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan amanat Piagam ASEAN yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, Pemerintah telah menyampaikan seluruh dokumen pengesahan kepada DPR RI pada tanggal 9 April 2019.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat.

Analisis kuantitatif yang mengukur biaya dan manfaat dari liberalisasi AFAS Paket 10 telah dilakukan menggunakan beberapa alat analisa seperti : *global pride analysis project* (GPAP 9) serta juga memanfaatkan ketersediaan alat simulasi hambatan perdagangan, yaitu *Service Trade Restrictiveness Index* (STRI *simulation*) hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa biaya bagi Indonesia dalam mengimplementasikan AFAS Paket 10 ini adalah adanya tekanan pada neraca perdagangan yang disebabkan oleh pembukaan akses pasar dan jasa untuk negara-negara ASEAN. Namun, pembukaan akses pasar ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan ekspansi perdagangan jasa yang lebih luas kepada anggota negara ASEAN lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan AFAS Paket 10 ini, Indonesia akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan yang diperoleh negara ASEAN lainnya dengan menggunakan indikator ekonomi makro, antara lain: satu, kesejahteraan atau *economic equal fair*. Peningkatan *output* dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, secara sektoral AFAS Paket 10 akan memberikan penyesuaian terhadap distribusi tenaga kerja dan *output* nasional.

Peningkatan akses pasar dalam komitmen AFAS Paket 10 akan meningkatkan perdagangan jasa Indonesia di Kawasan ASEAN dan memberikan *multi trial effect positive* pada beberapa indikator makro ekonomi. Pembukaan akses pasar melalui AFAS Paket 10 akan memberikan dampak berupa peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia sebesar USD30,05 Juta. Selanjutnya, pembukaan pasar sektor jasa dalam bentuk kelonggaran pada *foreign equity participation* akan meningkatkan jasa pada moda tiga yaitu, komersial, presens dan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan *investment stock* sebesar 0,03%.

AFAS Paket 10 juga berpotensi akan meningkatkan nilai perdagangan Indonesia di Kawasan ASEAN, baik nilai ekspor maupun nilai impor. Sektor yang paling banyak menyumbang nilai ekspor adalah komunikasi, transportasi lainnya, kontruksi, transportasi laut dan udara dan lain-lain. Pada jangka waktu menengah sampai panjang, seiring dengan peningkatan kinerja dan daya saing sektor jasa Indonesia melalui implementasi AFAS Paket 10. Diharapkan sektor jasa Indonesia akan berdaya saing di pasar regional dan global dan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap nilai perdagangan Indonesia.

Pembukaan akses pasar melalui pelaksanaan AFAS Paket 10 akan menyebabkan penyesuaian dengan kinerja sektor jasa. Sektor jasa, secara sektoral tenaga kerja akan banyak terserap pada sektor jasa komunikasi, transportasi, konstruksi dan perdagangan. Tenaga kerja pada sektor komunikasi akan meningkat hampir 5% dan tenaga kerja pada sektor transportasi akan meningkat hampir 3%. Penyesuaian pada distribusi tenaga kerja akan mempengaruhi kinerja *output* sektor riil. Sektor jasa yang paling banyak mengalami peningkatan *output* adalah sektor komunikasi dengan 2,5%, transportasi 1,5%, konstruksi 0,3%, perdagangan 0,1% dan transportasi laut 0,1%.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat.

Selain melakukan analisa di atas, kami juga melakukan analisa SWOT/*Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* untuk menyusun strategi dalam melaksanakan perjanjian AFAS Paket 10 tersebut. Dalam melakukan awalan analisis SWOT dimaksud, Kemendag telah melakukan *survey* yang melibatkan para *stake holder* Kementerian/Lembaga dan asosiasi yang terkait dalam pelaksanaan AFAS Paket 10. Berdasarkan analisis SWOT atas *survey* tersebut dihasilkan penguatan strategi Indonesia dalam menyampaikan AFAS Paket 10, yaitu: Strategi *strengths opportunities*. Strategi SO tersebut berada di kuadran 1 dari diagram SWOT yang menjelaskan bahwa untuk implementasi AFAS Paket 10, Indonesia mempunyai kekuatan dan diharapkan banyak kesempatan.

Dengan demikian, hasil analisa ini menunjukkan Indonesia mampu menjalankan strategi dengan memanfaatkan kekuatan domestik Indonesia untuk menarik manfaat sebesar-besarnya dari peluang-peluang eksternal yang ada dari implementasi AFAS Paket 10 ini.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa kami telah menerima dukungan dan persetujuan dari para Menteri dan para asosiasi terkait atas pengesahan protokol AFAS Paket 10.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan AFAS Paket 10. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka AFAS Paket 10 perlu disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebagaimana protokol-protokol AFAS sebelumnya, protokol AFAS Paket 10 ini juga perlu diratifikasi agar dapat diimplementasi serta dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih pada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat atas dukungan dan kerja samanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam mengabdikan dan bakti kepada masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Lebih kurangnya saya minta maaf.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FAISOL RIZA):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, kepada Saudara Menteri Perdagangan yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan, masukan dan lain-lain.

Tapi, kalau sudah dirasa cukup.

ANGGOTA:

Cukup.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Pimpinan, pimpinan sebentar. Saya mau saran

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Sedikit, Pimpinan.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Sebentar aja, sedikit aja. Sebentar

KETUA RAPAT:

Baik, kalau gitu. Saya berikan kesempatan.

Yang lain udah cukup ya. Jadi, cukup Bu Nevi nih ya. Silakan, Bu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Makasih, Pimpinan.

Kami dari Fraksi PKS memandang bahwa paket 10 perjanjian perdagangan internasional AFAS ini:

1. Harus dapat melindungi industri jasa dalam negeri, Pak Menteri;
2. Mengutamakan prinsip efisiensi berkeadilan dalam program investasi, khususnya investasi. Agar dilakukan, tetap melakukan kemitraan dengan UMKM;
3. Penggunaan tenaga kerja dalam negeri sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

MENTERI PERDAGANGAN:

Kami akan perhatikan, Bu Nevi.

Terima kasih.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pimpinan, 2 menit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, yang.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kalau saya boleh usul karena, ini kan persetujuan ratifikasi ya kan ya. Yang diminta persetujuan dengan Keputusan Presiden, ya kan. Saya rasa cukup setiap fraksi mengatakan setuju, setuju, setuju. Nah, diketok ketok ketok, selesai sehingga, kita bikin kesimpulan Komisi VI menyetujui, gitu. Jadi, nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi karena, ini sudah jelas semua yang ada di dokumen ini, gitu loh.

KETUA RAPAT:

Baru kali ini saya diprotes Bu Evita. Cerdas. Jadi, begitu ya. Sebagaimana dan saya kira nggak perlu per fraksilah ya. Jadi, tadi apa yang disampaikan Bu Nevi mewakili PKS. Jadi, saya minta kepada semua peserta, Anggota untuk saya tanyakan apakah kita menyetujui apa Protokol 10 AFAS ini, diproses melalui mekanisme peraturan Presiden ya. Setuju ya?

ANGGOTA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

ANGGOTA:

Setuju, setuju.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, akan dilanjutkan Pak Hekal ini untuk kesimpulannya. Silakan, Pak Hekal.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sedikit, Pimpinan.

Mengenai ini, saya mau tanya masalah RCP. Gimana itu prosesnya sampai sekarang? Sedikit aja, jawab sedikit aja.

MENTERI PERDAGANGAN:

Jadi, RCP ini sedang dalam proses diterjemahkan dan kemudian eh oh *sorry* saya pikir. Diterjemahkan dan akan masuk ke proses ratifikasi pada bulan Mei. Silakan, Pak Wamen untuk.

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN:

Betul, yang tadi Pak Menteri katakan Pak Darmadi. Itu sudah masuk dalam tahap proses ratifikasi sebenarnya. Jadi, kami nanti menunggu dari DPR, dari Komisi VI untuk melakukan proses selanjutnya. Karena, sudah di *taken* oleh Pak Presiden. Kami terakhir itu kan 15 November 2020. Saya pikir ini sekarang bulan Februari. Mungkin, kita berharap dalam satu bulan ke depan bisa dipercepat, Pak. Mungkin itu.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

India jadi keluar?

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN:

Jadi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Jadi keluar.

MENTERI PERDAGANGAN:

Siap. Arahkan.

KETUA RAPAT (MOHAMMAD HEKAL, M.B.A.):

Lebay.

Oke, kita langsung ke *draft* kesimpulan. Tolong ditayangkan ya. Baik.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan terkait *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket 10 dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa. Rabu, 4 Februari 2021:

1. Komisi VI DPR RI menyetujui *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket 10 dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) melalui mekanisme peraturan Presiden.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI meminta Menteri Perdagangan untuk menyampaikan rencana aksi tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket 10 dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

Setuju, Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI untuk mengkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya, terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri jasa Indonesia agar dapat berkompetisi dengan negara lainnya akibat persetujuan perjanjian ini.

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI agar bersinergi dengan asosiasi-asosiasi jasa lainnya untuk meningkatkan kompetensi produk jasa di Indonesia. Sehingga, mampu bersaing di pasar global dan membawa dampak pada penguatan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Setuju ya, ok.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih atas kesimpulannya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Izin, Pak Ketua sebelum ditutup.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Saya hanya pesan saja ke Pak Menteri. Tolong dong setiap perjanjian internasional ini, itu disosialisasikan kepada para masyarakat dan pelaku bisnis. Jadi, kita juga bisa sosialisasikan di Dapil kita masing-masing.

KETUA RAPAT:

Luar biasa.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Apa sih manfaatnya gitu. Jadi, jangan di sah sah kan, tapi kita tidak melakukan sosialisasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

KETUA RAPAT:

Udah berundingnya nggak ikut.

ANGGOTA:

Setuju, tante.

KETUA RAPAT:

Sosialisasinya nggak. Gimana ya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak Wamen, yang RCP juga.

ANGGOTA:

Setuju.

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN:

Belum, Pak Darmadi. Nanti, kita adakan.

KETUA RAPAT:

Itu dari dunia maya pun mencolok semua ya. Baik.

F-P. NASDEM (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A.):

Sama ini, Pimpinan. Kalau perjanjian, kalau ini saya rasa kan cuman paket 10 ya. Tapi, kalau perjanjian-perjanjian yang sifatnya mungkin baru atau sesuatu yang ini. Waktu itu kan kita pernah bicarakan Pak Sekjen ya, supaya ada satu forum supaya kita bisa bahas detail. Nggak mungkin di sini, karena di sini waktunya nggak cukup.

KETUA RAPAT:

Iya, betul. Sekarang tugasnya Pak.

F-P. NASDEM (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A.):

Iya, FGD. Kita bahas detail. Baru ketika sudah diskusinya mengerucut tinggal di sini diketok.

KETUA RAPAT:

Iya, karena Pak Sekjen baru juga.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Terus apa RCP itu, pro kontra itu. Itu ngeri itu. Tolong dijelaskan India keluar kenapa. Nanti kasih tau kita juga.

ANGGOTA:

Pimpinan, Pimpinan.

ANGGOTA:

Kapoksi PKB bicara. Kapoksi PKB bicara

ANGGOTA:

Kapoksinya ini belum bicara ini buat PKB. Kebetulan menterinya dari PKB.

F-PKB (IR. H.M. NASIM KHAN):

Jadi, kita perlu Pimpinan. Kita perlu juga pertemuan dengan Dirjen. Tadi, lupa di kesimpulan, Pimpinan. Nggak disampaikan, saya terlambat. Solat duluan. Jadi, perlu ada pertemuan juga khusus untuk RDP itu. Yang seperti disampaikan Pak Martin tadi. Itu perlu, Pak. Ya, per Eselon itu, Pak. Semuanya per bidang, jadi kita tahu. *Roadmap* nya atau apa. Saya kira tidak harus resmi di RDP, mungkin dibahas dulu secara FGD atau apa. Nanti bisa diatur.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi saya tahu itu pesan dari rapat sebelumnya. Sebetulnya lupa dicatat. Intinya, teman-teman mau membahas mungkin nanti dengan Eselon I, Pak Menteri terkait dengan ya, terkait dengan perjanjian, bukan perjanjian dagang, dengan tupoksinya masing-masinglah.

Ok, mungkin kita berikan ada *closing statement* dari Pak Menteri. Cukup ya? Kalau gitu, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Perdagangan beserta jajarannya dan atas nama Pimpinan Komisi VI, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi VI yang

kami banggakan yang telah mengikuti rapat pada hari ini dengan penuh sabar dan penuh perhatian.

Demikian rapat kami tutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.03 WIB)

Jakarta, 3 Februari 2021

a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001